

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pariwisata merupakan bagian dari sektor industri di Indonesia yang prospeknya cerah dan mempunyai potensi dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Sejak tahun 1978 pemerintah terus berusaha mengembangkan kepariwisataan dalam meningkatkan penerimaan devisa, memperluas lapangan kerja, dan memperkenalkan kebudayaan.

Pembinaan serta pengembangan pariwisata dilakukan dengan tetap memperhatikan terpeliharanya kebudayaan dan kepribadian nasional. Untuk itu perlu diambil langkah-langkah dan pengaturan-pengaturan yang lebih terarah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu, antara lain bidang promosi, penyediaan fasilitas serta mutu, dan kelancaran pelayanan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB I Ketentuan Umum Pasal (1) “otonomi daerah adalah bahwa daerah diberikan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi untuk dikembangkan, sesuai wujud dari pelaksanaan Otonomi Daerah.”

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah Penataan Daerah Bagian Kesatu Umum Pasal 31 ayat (1) Penataan Daerah sebagaimana dimaksud ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata

kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing Daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya Daerah.

Pemerintahan Daerah yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi. Dalam ketentuan ini pemerintahan sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan dan lingkungan jabatan, yaitu pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber kepariwisataan sendiri yang didukung oleh perimbangan kepariwisataan antara pusat dan daerah. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah, berarti daerah mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah secara tidak langsung, Kekuasaan yang diberikan bukan diartikan sebagai kebebasan mutlak untuk daerah, karena tujuan otonomi adalah pemberian otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab menuntut adanya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian daerah agar mampu berkembang serta kewajiban memikul tanggung jawab yang diberikan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah yang ada di Kabupaten Sukabumi.

Hubungan antara Kepariwisata Kabupaten Sukabumi dengan Pemerintah daerah sangat menentukan kemandirian otonomi. Dinas Pariwisata kabupaten Sukabumi sebagai organisasi yang terdekat dengan daerah dalam pembangunan kepariwisataan merupakan ujung tombak penentu keberhasilan kepariwisataan daerah.

Pengembangan dan pembangunan pariwisata yang dijadikan salah satu Rencana terdapat berbagai stakeholders yang terlibat (Pemerintah, lembaga non pemerintah), SDM (Sumber Daya Manusia), program-program, dana dan fasilitas. berdasarkan keterlibatan stakeholders dan berdasarkan kondisi saat ini didapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas di dalam upaya pengembangan daerah tujuan wisata di kabupaten Sukabumi kedepannya.

Memanfaatkan peluang pariwisata yang secara prospektif dapat menguntungkan, maka diperlukan juga iklim usaha yang kondusif agar dapat menjamin berlangsungnya kegiatan pariwisata, serta membuka peluang investasi guna meningkatkan aktivitas pariwisata, yang selanjutnya melalui pembangunan secara optimal diharapkan akan dapat menarik dunia usaha untuk melakukan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sukabumi dapat dipastikan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan pada gilirannya akan memberi dampak secara langsung terutama dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dan menunjang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Berdasarkan isi dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata BAB IV Pembangunan Kepariwisata Pasal 6 “Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

Selanjutnya berdasarkan isi dari Undang Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 7 Pembangunan kepariwisataan meliputi: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan. Kabupaten Sukabumi mempunyai banyak tempat wisata yang sangat potensial jika dikembangkan dengan baik dan sudah berjalan.

Kabupaten Sukabumi juga merupakan destinasi wisata dari luar kota saat Liburan Panjang Banyak Pembangunan wisata alam dan budaya di Sukabumi dapat dilihat dari keadaan sarana dan prasarana wisata di berbagai tempat objek wisata yang belum lengkap dan tidak terawat. Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dikelola dan dikembangkan dengan baik dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung akan meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Kabupaten Sukabumi memiliki daya tarik tersendiri dan memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan sebagai destinasi objek pariwisata ke depan.

Tabel 1.1

**KUNJUNGAN WISATAWAN MANCANEGARA DAN WISATAWAN
NUSANTARA KE KAB. SUKABUMI**

No	Tahun	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah dari Wisatawan Nusantara dan mancanegara
1	2010	2.306.519	44.981	2.351.500
2	2011	2.342.735	55.795	2.398.530
3	2012	2.551.807	46.975	2.598.782
4	2013	2.608.546	99.932	2.708.478
5	2014	2.845.079	72.581	2.917.660
6	2015	3.380.193	115.547	3.495.740
7	2016	3.485.006	115.548	3.600.554

(Dinas Parawisata Kab. Sukabumi)

Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Sukabumi sampai pada tahun terakhir mengalami peningkatan. dari kunjungan wisatawan. Terlihat bahwa dari data di atas Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu destinasi wisata di Jawa Barat yang didukung oleh berbagai obyek dan daya tarik wisata yang menarik serta khasanah seni budaya yang unik, berupaya untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Sukabumi sebagai daerah tujuan wisata yang tetap diminati oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.

Berdasarkan hasil observasi Salah satu program Dinas Pariwisata yakni pengembangan daerah tujuan wisata ternyata tidak efektif dan tidak mampu mengatasi masalah yang hingga kini belum dapat terselesaikan dengan baik. Ada banyak permasalahan yang ditemui, dimana pengembangan dan penyediaan sarana kepariwisataan belum optimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti kurang terpeliharanya objek wisata alam, budaya dan infrastruktur seperti jaringan jalan, penyediaan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, kondisi ini dikhawatirkan pada masa yang akan datang akan mengalami penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke kabupaten sukabumi.

Keberadaan dari objek wisata tidak mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat setempat, Sebagian besar objek pariwisata juga tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan dalam proses pembangunannya pun tidak memperhatikan aspirasi dari masyarakat, hal ini kemudian membuat masyarakat kurang memedulikannya, hal ini disebabkan tidak adanya kerjasama antara pemerintah setempat dengan masyarakat karena masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing dan kurangnya pengetahuan juga informasi sehingga masyarakat menjadi apatis dengan perencanaan pembangunan tersebut bahkan tidak mendukung.

Disamping itu sistem pemasaran yang kurang luas atau bahkan tidak tepat sasaran keberhasilan pariwisata di kabupaten sukabumi terletak pada promosi yang dilakukan seperti, terkendala dengan dana kerana dalam ilmu pemasaran, promosi adalah hal terpenting dari sebuah produk. Nilai jual beli suatu produk bisa meningkat dengan menerapkan jaringan promosi yang lebih luas dengan cara

efektif dan efisien. Sehingga kedepannya pariwisata kabupaten sukabumi mampu menyaingi pariwisata lainnya.

Tidak hanya hal tersebut di atas yang menjadi masalah, tetapi juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola kurang berkompeten dalam masalah pariwisata, Hal ini disebabkan masih rendahnya daya saing tersebut dapat dilihat dari ketimpangan antara proporsi, kurangnya tenaga kepariwisataan sehingga peluang pendidikan pariwisata sangat menjanjikan.

Seharusnya pihak-pihak yang disebutkan diatas memberikan perhatian yang lebih terhadap Pencapaian Program pembangunan pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap pariwisata. Pembangunan pariwisata merupakan program jangka panjang dan tidak lepas dari pelestarian alam dan lingkungan hidup serta budaya masyarakat setempat.

Kabupaten Sukabumi memiliki berbagai macam objek wisata alam dan wisata budaya yang apabila dibangun dan dikembangkan dengan baik dengan tepat maka akan menjadi tujuan wisata yang menarik untuk dikunjungi. kabupaten Sukabumi di kenal dengan istilah GURILAPSS, yaitu Gunung, rimba, Laut, Pantai, Sungai dan yang terakhir adalah wisata alam Geopark ciletuh sebagai destinasi baru . Selain itu, dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung maka akan secara langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada prinsipnya Dinas Pariwisata merupakan lembaga Pemerintah Daerah yang bertugas menangani dan melakukan pembangunan di sektor pariwisata memiliki acuan, pedoman dan penuntun dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan bertekad dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengelolah dan mengembangkan seluruh potensi yang ada, mengembangkan akuntabilitas publik, mendorong partisipasi masyarakat, merupakan sumber keuangan daerah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagainya, yang amat diperlukan dalam optimalisasi penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah.

Bedasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan hal tersebut menjadi bahan penelitian Skripsi dengan judul **”EFEKTIVITAS RENCANA DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN SUKABUMI”**
(STUDI KASUS DINAS PARIWISATA KABUPATEN SUKABUMI)

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam hal ini sebagai berikut :

1. Kurangnya Efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten sukabumi
2. Adanya hambatan-hambatan efektivitas rencana dalam pengelolaan, pembangunan objek pariwisata di kabupaten Sukabumi.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan masalah pokok dalam penelitian ini, dapat disusun penelitian (*resert question*) sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Rencana dalam pembangunan Pariwisata oleh Dinas Pariwisata di kabupaten Sukabumi?
2. Apa yang menjadi faktor Penghambat Efektivitas rencana dalam pembangunan Pariwisata di Kabupaten Sukabumi?
3. Upaya apa untuk mengatasi hambatan hambatan efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata di kabupaten sukabumi ?

D. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka maksud dari penelitan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisi bagaimana efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata di kabupaten Sukabumi

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata oleh Dinas Pariwisata di Kabupaten sukabumi.
2. Untuk mengatahui faktor penghambat efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui upaya apa untuk mengatasi hambatan Efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata di kabupaten sukabumi.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aktifitas akademika Universitas Islam Negeri Bandung fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam mengkaji Efektivitas rencana dalam pembangunan pariwisata oleh dinas pariwisata kabupaten sukabumi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mahasiswa/siswi Fisip jurusan Admininstrasi Publik dengan penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan dan juga dapat memberikan masukan saran dan solusi kepada lembaga pemerintah kabupaten sukabumi khususnya pada Dinas pariwisata dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata di kabupaten sukabumi.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sebuah bagian atau alur kerja dalam memecahkan permasalahan penelitian. Kerangka kerja tersebut dimulai dari permasalahan sampai pencapaian tujuan. Dalam alur pikir atau alur kerja tersebut, hendaknya terlihat kedudukan dan fungsi landasan teori. Kerangka pemikiran ini disusun dengan berdasarkan pada tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan atau terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Efektivitas Rencana dalam pembangunan pariwisata oleh Dinas Pariwisata di kabupaten Sukabumi. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merangkai pokok pemikiran, Agar nantinya peneliti mampu mendapatkan jalan keluar dengan mudah dalam menganalisis dan menjawab berbagai persoalan yang terjadi pada proses penelitian, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Pariwisata merupakan kegiatan yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik-buruknya lingkungan dan terjaganya aset wisata. Tanpa itu semua tidak memungkinkan pariwisata dapat berkembang. Semakin besarnya kepariwisataan di suatu daerah makin besar juga bahaya perusakan dan pencermarannya.

dalam pengembangan pariwisata diharapkan dapat memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta mendorong pembangunan daerah. Sektor pariwisata juga diharapkan sebagai lokomotif (penggerak) dan magnet (pemicu) dalam memperbaiki kondisi ekonomi.

Pencapaian pogram pembangunan pariwisata memerlukan suatu Efektivitas Rencana, sebagaimana diungkapkan Gibson: 1994 (Dalam buku Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses) bahwa pengertian Efektivitas adalah sebagai berikut :

“pencapaian tujuan yang ditetapkan dengan usaha kerja sama” pendapat yang mempunyai pertimbangan luas, menyatakan bahwa organisasi sebagaimana halnya individu dan kelompok, harus dievaluasi menurut ukuran pencapaian tujuan.

Sesuai dengan pendapat tersebut di atas diketahui tingkat pencapaian tersebut tujuan yang khas manajemen berdasarkan sasaran berbeda menurut kasusnya. dalam beberapa hal, manajer dan bawahan mendiskusikan sasaran sasaran dan mencoba mencapai kesepakatan yang menguntungkan bersama.

Sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa efektivitas rencana adalah suatu cara atau taktik rencana dasar yang menyeluruh dari rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa sasaran.

Menurut Drs. Malayu S.P. Hasibun (Dalam Buku Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah) Rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi, setiap Rencana mengandung dua unsur yaitu “tujuan” dan “pedoman”.

Selanjutnya Pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyaldi dan Dedt Supriyadi Bratakusumah, 2005)

Pembangunan adalah perubahan-perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi berkehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi-segi kehidupan yang lainnya.

Handoko 2003:103 (Dalam Buku Manajemen) menetapkan beberapa kriteria dapat digunakan untuk menilai Efektivitas Rencana sebagai berikut :

1. **Kegunaan.** Agar berguna bagi manajemen dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya yang lain, suatu rencana harus fleksibel, stabil, berkesinambungan, dan sederhana.
2. **Ketepatan dan objektivitas.** Rencana-rencana harus dievaluasi untuk mengetahui apakah jelas, ringkas, nyata dan akurat. Berbagai keputusan dan kegiatan manajemen lainnya hanya efektif bila didasarkan atas informasi yang tepat.
3. **Ruang lingkup.** Perencanaan perlu memperhatikan prinsip-prinsip kelengkapan , kepaduan, dan konsisten berapa luas cakupan rencana.
4. **Efektivitas biaya.** Efektivitas biaya perencanaan dalam hal ini adalah menyangkut waktu, usaha dan aliran emosional.

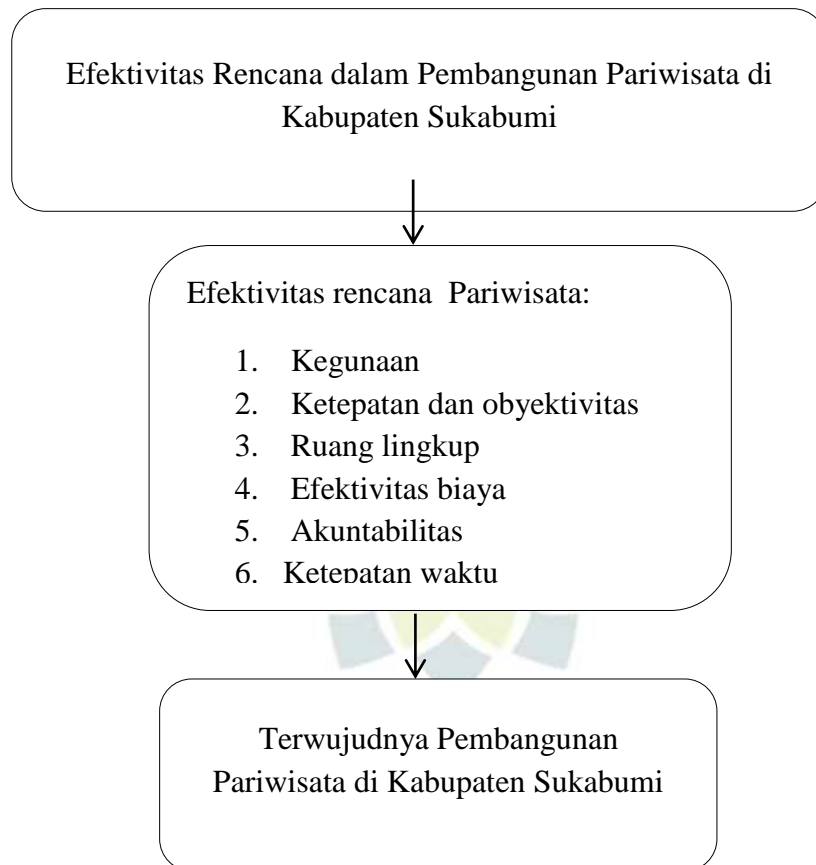
5. **Akuntabilitas.** Ada dua aspek akuntabilitas perencanaan. Tanggungjawab atas pelaksanaan perencanaan, dan tanggungjawab atas implementasi rencana. Suatu rencana harus mencakup keduanya.
6. **Ketepatan waktu.** Para Perencana harus membuat berbagai perencanaan, berbagai perubahan yang terjadi sangat cepat dan dapat menyebabkan rencana tidak tepat atau sesuai untuk berbagai perbedaan waktu.



Dari uraian di atas, model kerangka penelitian sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



(Sumber :Handoko 2003)